

LIVING ENVIRONMENT AGENCIES STRATEGY IN COASTAL WASTE MANAGEMENT IN AMBON CITY MALUKU PROVINCE

Regina Far Far

Abstract

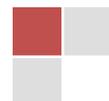
This study aims to find out and analyze the implemented coastal waste management, to know and analyze the obstacles encountered in the implementation and to know and analyze the appropriate ideal strategies / concepts in coastal waste management. The theory used is the waste management theory proposed by Wilson, namely the aspects of regulation, institutions, funding, community participation and technology and strategy theory proposed by Wheelen and Hunger namely formulation, implementation and evaluation and supervision. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used was interviews, observation, and documentation. The results showed that the environmental and solid waste department's strategy in coastal waste management were not effective, this was evident from several aspects, namely the absence of regulating laws, institutional aspects that were not owned by the department, the aspect of technology which still conventional and the low rate of community participation. Therefore, in this study the authors convey several strategies or concepts in waste management, such as establishing strict laws and forming law enforcement officers, forming a special division to handle coastal waste, and increasing community participation through the establishment of yellow troops and the tourism ambassadors.

Keywords : Strategy, Coastal Waste Management, Local Government Organization

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Kebijakan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi dari sentralisasi ke arah desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk lebih aktif dan lebih dapat mengoptimalkan lagi potensi daerah untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Salah satu bentuk pelayanan publik sebagai bentuk dari implementasi kewenangan pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kebersihan. Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama baik itu dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat karena merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Diperlukan



penangan yang serius oleh seluruh *stakeholder* dalam menangani persoalan kebersihan khususnya penangan masalah sampah.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Seiring dengan peningkatan populasi penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah dan keragaman sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga, perkantoran, perusahaan, maupun dari kegiatan lain. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Ambon yang semakin meningkat dan kegiatan kota yang berkembang dengan cepat juga menimbulkan dampak adanya kecenderungan sampah yang meningkat dan bervariasi. Jumlah dan laju penduduk perkotaan cenderung meningkat mengakibatkan sistem infrastruktur yang ada menjadi tidak memadai, karena penyediaannya lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan penduduk.

Permasalahan pengelolaan sampah pesisir oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Tingkat Volume Sampah Per Hari Di Kota Ambon

No.	Tahun	Perkiraan Produksi sampah Per Hari (m ³)	Volume Sampah darat (m ³)	Volume Sampah Pesisir (m ³)
1.	2015	1.665,20	1.120,20	545,00
2.	2016	1.785,40	1.190,40	595,00
3.	2017	2.001,73	1.290,88	710,85

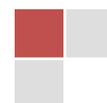
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa volume sampah baik itu sampah di darat maupun sampah pesisir setiap hari semakin banyak dan yang dapat diangkut ke TPA tidak semuanya karena jumlah armada dan tenaga yang belum memadai sehingga masih banyak sampah yang tertinggal di pesisir pantai maupun di TPS terdekat

Permasalahan dalam penanganan sampah terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi dengan kemampuan dalam pengelolaannya, volume sampah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perubahan kualitas hidup dan dinamika kegiatan masyarakat

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Petugas Kebersihan Untuk Sampah Di Darat Dan Sampah Di Pesisir

No.	Pegawai Kontrak dan buru untuk sampah darat	Pegawai kontrak dan buruh untuk sampah pesisir
1.	Pengawas sapu: 6 orang	Pengawas: 1 orang
2.	Pengawas taman : 6 orang	Sapu pantai : 2 orang
3.	Sopir taman : 2 orang	Pembawa speed : 4 orang
4.	Sapu jalan pagi : 354 orang	Petugas kebersihan : 16 orang
5.	Sapu jalan siang : 78 orang	Buruh sungai : 6 orang



6.	Sapu jalan pasar : 7 orang	Sopir dum truck : 1 orang
----	----------------------------	---------------------------

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

Kebersihan wilayah pesisir masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dimana pengelolaan sampah pesisirhanya menggunakan empat speed boat sampah yang bertugas untuk membersihkan seluruh wilayah pesisir Kota Ambon dengan petugas sampah yang masih sangat minim dan peralatan yang digunakan pun masih menggunakan peralatan manual, seperti jaring sampah, kantong sampah, dan lain-lain. Untuk melihat perbandingan dari petugas kebersihan di darat dan di pesisir

TEORI

Konsep Strategi

Menurut Wheelen, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan

Suatu manajemen yang baik haruslah memiliki kemampuan untuk memformulasikan strategi yang baik., sekaligus juga dapat mengimplementasikannya. manajemen stratejik secara umum dapat dibagi menjadi tiga langkah pokok, yakni:¹

1. Perumusan strategi (*formulation strategy*)
2. Penerapan strategi (*implementing strategy*)
3. Evaluasi (*evaluating*).

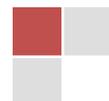
Berdasarkan penjelasan di atas, proses manajemen strategis harus dilaksanakan secara sistematis dan berurutan. Dengan melaksanakan tahapan tersebut, Maka organisasi dapat menentukan strategi terbaik dalam skala jangka panjang untuk kemajuan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut penulis menggunakan teori strategic tersebut, dengan mempertimbangkan keadaan yang dihadapi di lapangan. Dimulai dari tahap perumusan strategi-strategi yang dilihat berpeluang dalam mengatasi permasalahan, kemudian menerapkan startegi yang telah dirumuskan ke dalam berbagai kegiatan atau program-program dan setelah itu melakukan evaluasi yang dapat menentukan strategi mana yang berhasil diterapkan dan mana yang perlu dilakukan pembenahan

Konsep Organisasi

Menurut Scott dalam Syamsir, ukuran organisasi adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.² Ukuran organisasi dalam beberapa penelitian selalu digunakan sebagai variabel bebas yang dikur melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengukur jumlah pegawai dalam organisasi. Jumlah pegawai yang banyak dengan tidak disertai kemampuan dan keahlian pun hanya akan menjadi beban bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan organsasi dengan baik maka ukuran atau struktur organisasi sangat perlu diperhatikan.

¹Eddy Yunus, Management Strategis, Yogyakarta, Andi, 2003, hal.14

²Ibid, hal.90



Setiap organisasi memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan wewenang, tanggung jawab, hubungan interaksi, dan besar kecilnya sebuah organisasi. Untuk mengetahui ukuran ideal dari sebuah organisasi maka dapat digambarkan oleh Syamsir sebagai berikut:³

1. Struktur Linier (*Line Structure*)
Ciri-ciri struktur organisasi linier, yaitu: (i) mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara langsung secara vertical yang dikaitkan dengan jabatan dan tugas tiap tingkatan, (ii) bawahan hanya mempunyai satu atasan, (iii) adanya kesatuan komando atau perintah, (iv) tidak mempunyai staf dan penasihat, dan (v) hanya cocok untuk organisasi masih kecil dan sederhana.
2. Struktur Fungsional (*Functional Structure*)
Struktur ini memberikan wewenang kepada masing-masing kepala unit untuk memberikan komando (instruksi, meminta laporan, dan lain-lainnya) sesuai dengan bidang dan fungsinya.
3. Struktur Line dan staff (*Line And Staff Structure*)
Dalam struktur ini, staf ahli bertindak sebagai penasihat sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada pimpinan.

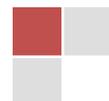
Ketiga struktur diatas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan dari struktur pertama yaitu: struktur organisasi sangat sederhana dan jelas, begitu pula dengan kewenangan dan tanggung jawabnya mengalir dengan jelas, satu bagian dengan bagian lain memiliki keterkaitan, semua instruksi dapat berjalan dengan lancar dan cepat, adanya rantai komando yang jelas sehingga tidak membingungkan bagi staf atau bawahannya, serta adanya satu kesatuan perintah satu atasan dan satu bawahan, sehingga tidak membutuhkan penasihat. Sedangkan kekurangannya adalah struktur ini hanya cocok untuk organisasi yang masih sederhana, karena pucuk pimpinan akan mengalami kesulitan ketika organisasi dengan struktur seperti ini berkembang, dan suatu pekerjaan tidak dapat dikerjakan dengan segera, karena akan mengganggu jalur hirarki.

Struktur organisasi dibuat dan difungsikan tidak hanya dimaksudkan agar organisasi berfungsi efektif, namun struktur organisasi dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Cushway dan Lodge dalam Syamsir struktur organisasi dimaksudkan untuk:⁴

- a. Menunjang strategi organisasi.
- b. Mengorganisasikan sumberdaya dengan cara yang paling efisien dan efektif.
- c. Mengadakan persiapan pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang efektif antara perorangan dan kelompok.
- d. Memastikan koordinasi kegiatan organisasi yang efektif dan menggambarkan proses pembuatan keputusan.

³Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*, Bandung, Rosda, 2015, hal.80-82

⁴Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen*, Alfabeta, Bandung, hal.93



- e. Mengembangkan dan menggambarkan garis-garis komando ke atas, ke bawah dan ke seluruh organisasi.
- f. Memungkinkan pemantauan dan peninjauan kegiatan-kegiatan organisasi secara efektif.
- g. Menyediakan mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan keadaan lingkungan internal dan eksternal.
- h. Memberikan sarana penanganan keadaan genting dan masalah.
- i. Membantu memotivasi, mengatur dan member kepuasan kerja kepada setiap anggota organisasi.
- j. Menyiapkan penggantian manajemen (suksesi)

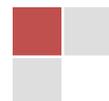
Berdasarkan tujuan atau dimaksudkannya adanya struktur organisasi adalah yang terutama bahwa menunjang strategi organisasi, berdasarkan penelitian penulis untuk menemukan suatu strategi yang tepat maka sangat dibutuhkan struktur organisasi yang tepat dan memiliki semua unsur yang dibutuhkan sebuah organisasi guna mencapai tujuan organisasi.

Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Corry Manulang dalam tulisan pendeknya yang berjudul tantangan penelitian mikroplastik di Indonesia, seperti sampah pada umumnya, sampah laut atau yang disebut juga *marine debris/marine litter* didefinisikan sebagai bahan padat persisten yang diproduksi atau diproses secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan ke dalam lingkungan laut seperti barang-barang yang digunakan misalnya kaca atau botol plastik, kaleng, tas, balon, karet, logam, *fiberglass*, puntung rokok, dan bahan-bahan lainnya yang berakhir di laut dan sepanjang pesisir pantai (CSIRO, 2014). Lebih lanjut menurut Thompson memperkirakan hingga 10% dari plastik yang diproduksi berakhir di laut. Sampah yang berada dilingkungan laut merupakan *output* dari infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah yang kurang memadai disertai dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Paradigma yang primitif, laut dianggap seperti tong raksasa yang mampu menampung semua sampah dari daratan.⁵

Masyarakat seringkali menganggap lautan sebagai tong sampah raksasa, sehingga segala sesuatu yang tidak terpakai atau tidak berguna lagi dibuang kelautan, di Kota Ambon sendiri hal ini sering kali terjadi dimana salah satu pasar berada tepat di atas laut membuat masyarakat baik itu pedagang maupun beli seringkali langsung membuang sisa-sisa makanan atau sampah plastik kelautan. Selain itu, salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kota Ambon adalah speed boat, dimana sering sekali masyarakat membuang sampah ke laut tanpa peduli dengan

⁵ Corry Manulang : Tantangan Penelitian Mikroplastik di Indonesia, LIPI.



keadaan disekitar. Ketidaktahuan dan tindakan masa bodoh seperti ini masih sering dilakukan tanpa ada masyarakat lainnya yang mengingatkan.

Kuncoro menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.⁶ Sistem pengelolaan sampah terpadu (*integrated solid waste management*) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai performa sistem yang tinggi dan hirarki sebagai berikut:⁷

1. *Source reduction*, berupa proses untuk mengurangi/meminimalisasi sampah sejak dari sumbernya, terutama reduksi sampah yang mengandung bahan b3 (bahan berbahaya dan beracun)
2. *Recycling*, proses mendaur ulang yang meliputi:
 - a. Proses pemilihan dan pengumpulan sampah
 - b. Persiapan penggunaan kembali
 - c. Penggunaan kembali bahan-bahan daur ulang
3. *Waste transformation*, yang meliputi perubahan fisik, kimia, dan biologi dari sampah perubahan tersebut dapat diaplikasikan untuk:
 - a. Meningkatkan efisiensi sistem dan operasional pengelolaan sampah.
 - b. Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau didaur ulang.
 - c. Menghasilkan barang lain yang bermanfaat dari sampah seperti kompos, dan energi dari gas methan.
4. *Landfiling*, merupakan akhir dari alur pengelolaan sampah, sehingga diharapkan sampah yang masuk ketinggian ini adalah:
 - a. Sampah yang tidak bisa didaur ulang dan tidak memiliki fungsi lagi
 - b. Residu dari sampah yang telah dipisahkan
 - c. Residu dari produk yang dihasilkan dari sampah

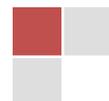
Pengelolaan sampah yang baik berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan penulis sebagai upaya mengelola atau mengatasi sampah dari sumbernya dan dilakukan secara menyeluruh, artinya bahwa setiap manusia pasti akan menghasilkan sampah dimulai ketika manusia itu dilahirkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kesadaran dan perhatian serta peran serta dari masing-masing individu untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan dengan tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu agar tidak mendatangkan atau menghasilkan sampah.

Pengelolaan sampah adalah suatu upaya penanganan sampah secara keseluruhan, baik sifat teknis, maupun non teknis seperti pengaturan dan sebagainya, dari mulai dihasilkannya sampai pada pemrosesan akhir agar tidak mengganggu kesehatan, lingkungan dan estetika. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah yaitu:⁸

⁶ Sejati Kuncoro, Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 24

⁷ Tchobonoglous et al, *IntegrtdSolid Waste Management*,1993, hal.78

⁸Loc.Cit



1. Untuk mengurangi tempat berkembang biaknya serangga dan binatang pengerat sebagai wabah penyakit
2. Untuk mengurangi insiden penyakit yang berhubungan dengan sampah
3. Untuk membina estetika
4. Untuk mewujudkan suatu keadaan lingkungan yang baik dan bersih, sehingga dapat menghemat pengeluaran devisa
5. Untuk pemanfaatan/daur ulang sampah yang secara kualitas dan kuantitas mengalami peningkatan.

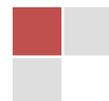
Menurut Wilson (2000), pengelolaan sampah yang baik perlu memperhatikan berbagai aspek, khususnya aspek-aspek (a) politis, (b) institusi, (c) sosial, (d) financial, (e) ekonomi, (f) teknik. Hal senada juga dikemukakan oleh Zurbrugg (2002) bahwa aspek-aspek seperti (a) Institusi dan regulasi, (b) pemahaman dan partisipasi, (c) pengetahuan dan kapasitas, (d) perlindungan lingkungan, (e) aspek teknis, dan (f) aspek financial dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sampah yang baik.⁹

Aspek-aspek yang telah disebutkan diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Aspek peraturan, ditingkat daerah, manajemen persampahan kota membutuhkan dasar hukum, peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem yang baik.
2. Aspek politis dan kebijakan publik, peran pemimpin politik (Walikota Ambon) dalam menentukan kebijakan untuk keberhasilan pengelolaan sampah sangat penting.
3. Aspek kelembagaan/organisasi, merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek sosial, budaya, dan kondisi fisik Kota Ambon, serta masyarakat yang dilayani.
4. Aspek operasional pengelolaan sampah, teknik operasional pengelolaan sampah, dalam hal ini sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
5. Aspek nilai ekonomi, financial dan pembiayaan, sebagaimana kegiatan yang lain, pengelolaan sampah di Kota Ambon juga membutuhkan dana atau anggaran yang cukup.
6. Aspek sosial-budaya dan peran serta masyarakat, masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dilakukan bersama dengan pemerintah dan pihak swasta.
7. Aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan, aspek kesehatan merupakan tujuan utama dibangunnya sistem pengelolaan sampah yang baik agar memutus rantai penyakit.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian menggunakan 5 (lima) dari 7 (tujuh) aspek yang dikemukakan oleh

⁹ Enri Damanhuri & Tri Padi, Pengelolaan Sampah Terpadu, ITB Press, 2018,hal.8



Wilson, dengan melihat kondisi tempat penelitian ini dilangsungkan, yaitu sebagai berikut: (a) Aspek Peraturan/Hukum yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pesisir, (b) Aspek Institusi/Organisasi yang melakukan pengelolaan sampah pesisir, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, (c) Aspek Pendanaan/Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ambon, (d) Aspek Peran serta masyarakat Kota Ambon dalam pengelolaan sampah pesisir, (e) Aspek Teknologi, dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan.

METODE

Untuk mengetahui strategi dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon dalam pengelolaan sampah pesisir, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research). Realisasi setiap pendekatan penelitian memerlukan metode penelitian yang relevan. Untuk mengkaji strategi yang paling tepat dalam pengelolaan sampah pesisir dalam rangka mewujudkan Ambon sebagai kota bebas sampah tahun 2025, peneliti menggunakan metode deskriptif. Jadi, pada kegiatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Sementara itu, sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, Visi dan Misi Kota Ambon, serta Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dan lain sebagainya.

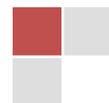
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sanpling dengan kriteria orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan mendapatkan keterangan. Selain purposive sampling, penulis juga menggunakan teknik snowball atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang diwawancarai atau dihubungi sebelumnya demikian seterusnya.

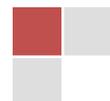
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi data *reduction* (reduksi data), data *display* (display data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Sampah Pesisir Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon belum maksimal, hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu:
 - a. Aspek Hukum
Belum adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sampah pesisir.
 - b. Aspek Kelembagaan/Institusi



- belum terbentuknya bidang yang menangani secara khusus pengelolaan sampah pesisir.
- c. Aspek pendanaan
Anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan sampah pesisir sangat mencukupi.
 - d. Peran serta masyarakat
Masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah pesisir.
 - e. Teknologi
Teknologi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon, masih sangat terbatas dan jauh dari kata kemajuan teknologi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon dalam pengelolaan sampah pesisir.
 - a. Kendala internal organisasi
 - 1) Masih lemahnya aturan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon
 - 2) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon
 - 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon
 - b. Kendala eksternal organisasi
 - 1) Kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat
 3. Strategi/konsep ideal yang dapat dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kota ambon
 - a. Merumuskan strategi dengan mempertimbangkan segala aspek yang menjadi kelemahan agar diperkuat menjadi sebuah kekuatan.
 - b. Menerapkan strategi melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - a) Merancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi visi dan misi Kota Ambon
 - b) Mempertimbangkan *the right man on the right place*
 - c) Pemberlakuan *self-assesment* pada setiap pegawai
 - 2) Melakukan penegakan hukum;
 - a) Merancang dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Membentuk satuan polisi pengawas sampah pesisir
 - 3) Memperbaiki sarana dan prasarana pendukung
Tentunya strategi yang dapat diterapkan adalah pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan sistem informasi di era digital ini, baik melalui para penggiat sosial



media pecinta lingkungan maupun melalui pihak-pihak LSM penyedia informasi tentang pengelolaan sampah yang lebih baik.

- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat
 - a) Pembentukan pasukan biru
 - b) Pembentukan duta wisata
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara bersama, baik dari Pemerintah maupun masyarakat dan LSM.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah pesisir yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan masih jauh dari kata maksimal hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan/institusi, aspek pendanaan, peran serta masyarakat, teknologi.
2. Kendala yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon adalah Masih lemahnya, Kurangnya sumber daya manusia, masih terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat
3. Strategi/konsep ideal yang dapat dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon adalah dengan Merumuskan strategi, Menerapkan strategi, Melakukan evaluasi dan pengawasan secara bersama, baik dari Pemerintah maupun masyarakat dan LSM.

Saran

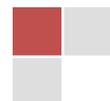
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Walikota, pembentukan bidang pengelolaan sampah pesisir, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern.
2. Perlunya meminimalisir seluruh kendala-kendala yang dihadapi dengan menetapkan hukum yang tegas serta membentuk aparat penegak hukum, membentuk suatu bidang khusus yang dapat menangani pengelolaan sampah pesisir, dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pembentukan pasukan biru dan pembentukan duta wisata.
3. Mengadakan perumusan strategi, menerapkan strategi yang telah dirumuskan dengan memilih pilihan yang dianggap paling tepat dalam menjawab berbagai kendala yang dihadapi, mengevaluasi atau melakukan pengawasan terhadap berbagai strategi terbaik yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bungin, Burhan, 2015, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.



- Creswell, John, W. 2016 *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Damanhuri, Enri. 2018 *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung.
- Hadari, Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hunger, David, 2003, *Management Strategis*, Andi, Yogyakarta.
- Kuncoro, Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Torang, Syamsir, 2016, *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kota Ambon Dalam Angka tahun 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Ambon.
- Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon

C. Sumber-sumber lain

- Budi kurniawan, Government ke Governance, diakses dari <http://catatan-politik-pemerintahan.blogspot.co.id/2011/12/goverment-ke-governance.html?m=1>
- Corry Manulang: Tantangan Penelitian Mikroplastik di Indonesia, LIPI.
- Kabartimur.co.id., tanggal 1 Agustus 2017

